

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

1. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Menurut Taniredja, dkk (2013: 1) mengatakan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antarwarga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan Negara.” Berdasarkan definisi tersebut Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam meningkatkan potensi yang dimiliki peserta didik untuk mewujudkan pribadi yang berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang baik akan membawa peserta didik kepada kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan pelajaran yang penting yang ada dalam setiap jenjang pendidikan. Di dalam pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa:

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal.

Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang wajib ditempuh dengan tujuan untuk mendidik peserta didik agar memiliki kemampuan dalam menjalin hubungan dengan sesama warga negara maupun dengan negara. Dengan begitu, peserta didik memiliki bekal sebelum mereka berpartisipasi di dalam lingkungan masyarakat maupun pemerintahan.

2. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Permendikbud No. 58 Tahun 2014, tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, meliputi:

- a. Secara umum tujuan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic committment, and civic responsibility*); (2) pengetahuan kewarganegaraan; (3) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*).

b. Secara khusus Tujuan PPKn yang berisikan keseluruhan dimensi tersebut sehingga peserta didik mampu:

- 1) menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial;
- 2) memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
- 4) berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial Budaya.

Berdasarkan tujuan PPKn di atas pada hakekatnya dalam pembelajaran, peserta didik dibekali kemampuan dalam hal sikap tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut Kansil dalam (Suharyanto, 2013: 195) menyatakan bahwa tujuan dan sasaran pendidikan kewarganegaraan ialah untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan dalam memahami, menghayati dan meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan serta memberikan bekal kemampuan untuk menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi.

Menurut Simorangkir dalam (Suharyanto, 2013: 195) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu:

- a. Memberikan pengertian, pengetahuan dan pemahaman yang sah dan benar;
- b. Meletakkan dan menanamkan pola berpikir (*Fattern of thought*) sesuai dengan pancasila dan watak (*character*) Indonesia;
- c. Menanamkan nilai-nilai moral pancasila kedalam diri peserta didik;
- d. Menggugah kesadaran anak sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia untuk selalu mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai moral Pancasila; dan Memberikan motivasi agar dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila.

Berdasarkan definisi di atas dapat bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang baik serta berguna bagi bangsa dan negara. Dengan kata lain, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan merupakan proses pembelajaran untuk membentuk kepribadian yang baik pada peserta didik yaitu membentuk sikap tanggung jawab pada peserta didik sebagai warga negara yang aktif di era globalisasi ini.

3. Fungsi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Permendikbud No. 58 Tahun 2014, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut:

a. PPKn merupakan pendidikan nilai, moral/karakter, dan kewarganegaraan khas Indonesia yang tidak sama sebangun dengan *civic education* di USA, *citizenship education* di UK, *talimatul muwatanah* di negara-negara Timur Tengah, *education civicas* di Amerika Latin.

b. PPKn sebagai wahana pendidikan nilai, moral/karakter Pancasila dan pengembangan kapasitas psikososial kewarganegaraan Indonesia sangat *koheren* (runut dan terpadu) dengan komitmen pengembangan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dan perwujudan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003.

Berdasarkan fungsi di atas, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus mampu mengembangkan potensi peserta didik melalui pembelajaran yang tidak hanya mengutamakan hasil dengan pengetahuan tetapi bagaimana peserta didik dapat memperoleh hasil yang maksimal dengan memiliki sikap yang selalu bertanggung jawab. Sehingga nilai yang dicapai bukan hanya angka melainkan sikap yang baik yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Karakteristik Mata Pelajaran PPKn

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Permendikbud No. 58 Tahun 2014 merupakan mata pelajaran penyempurnaan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang semula dikenal dalam Kurikulum 2006. Penyempurnaan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan: (1) Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperankan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; (2) substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang menjadi wahana psikologis-pedagogis pembangunan warganegara Indonesia yang berkarakter Pancasila.

Perubahan tersebut didasarkan pada sejumlah masukan penyempurnaan pembelajaran PKn menjadi PPKn yang mengemuka dalam lima tahun terakhir, antara lain: (1) secara substansial, PKn terkesan lebih dominan bermuatan ketatanegaraan sehingga muatan nilai dan moral Pancasila kurang mendapat aksentuasi yang proporsional; (2) secara metodologis, ada kecenderungan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan ranah sikap (*afektif*), ranah pengetahuan (*kognitif*), dan pengembangan ranah keterampilan (*psikomotorik*) belum dikembangkan secara optimal dan utuh (*koheren*).

Selain itu, melalui penyempurnaan PKn menjadi PPKn tersebut terkandung gagasan dan harapan untuk menjadikan PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang mampu memberikan kontribusi dalam upaya atas berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis multidimensional. PPKn sebagai mata pelajaran memiliki misi mengembangkan keadaban Pancasila, diharapkan mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warganegara yang cerdas dan baik serta menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan yang amanah, jujur, cerdas, dan bertanggungjawab.

Bertolak dari berbagai kajian secara filosofis, sosiologis, yuridis, dan pedagogis, mata pelajaran PPKn dalam Kurikulum 2013, secara utuh memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Nama mata pelajaran yang semula Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn);
- b. Mata pelajaran PPKn berfungsi sebagai mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter Pancasila;
- c. Kompetensi Dasar (KD) PPKn dalam bingkai kompetensi inti (KI) yang secara psikologis-pedagogis menjadi pengintegrasikan kompetensi peserta didik secara linier dan koheren dengan penanaman, pengembangan, dan/atau penguatan nilai dan moral Pancasila; nilai dan norma UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika; serta wawasan dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Pendekatan pembelajaran berbasis proses keilmuan (*scientific approach*) yang dipersyaratkan dalam kurikulum 2013 memusatkan perhatian pada proses pembangunan pengetahuan (KI-3), keterampilan (KI-4), sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) melalui transformasi pengalaman empirik dan pemaknaan konseptual. Pendekatan tersebut memiliki langkah generik sebagai berikut.
 - 1) mengamati (*observing*).
 - 2) menanya (*questioning*).
 - 3) mengeksplorasi/mencoba (*exploring*).

4) mengasosiasi/menalar (*assosiating*).

5) mengomunikasikan (*communicating*).

Pada setiap langkah dapat diterapkan model-model pembelajaran yang lebih spesifik. Contohnya model yang diterapkan berupa model proyek seperti Proyek Belajar Kewarganegaraan yang menuntut aktivitas yang kompleks, waktu yang panjang, dan kompetensi yang lebih luas. Kelima langkah generik di atas dapat diterapkan secara adaptif pada model tersebut.

e. Model pembelajaran dikembangkan sesuai dengan karakteristik PPKn secara holistik/utuh dalam rangka peningkatan kualitas belajar dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warganegara yang cerdas dan baik secara utuh dalam proses pembelajaran otentik (*authentic instructional and authentic learning*) dalam bingkai integrasi Kompetensi Inti sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Serta model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik bersikap dan berpikir ilmiah (*scientific*), yaitu pembelajaran yang mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran.

- f. Model penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar PPKn menggunakan penilaian otentik (*authentic assesment*). Penilaian otentik mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik. Penilaian otentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih otentik.
5. Ruang Lingkup Mata Pelajaran PKn

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pemetaan Ruang Lingkup dan Materi Belajar PKn SMP/MTs

No.	Ruang Lingkup	Materi
1	Persatuan dan kesatuan bangsa	Partisipasi dalam pembelaan Negara
2	Norma, hukum dan peraturan	Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
3	Hak asasi manusia	Pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM
4	Kebutuhan warga Negara	Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Prestasi diri
5	Konstitusi Negara	Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia
6	Kekuasaan dan politik	Otonomi daerah Demokrasi Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan
7	Pancasila	Pancasila sebagai dasar negara dan idiologi negara
8	Globalisasi	Dampak globalisasi

Sumber: Winarno (2013: 31) diolah dari Permendiknas No. 22 Tahun 2006

Tabel 2.2. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
Kelas VII, Semester 1	
1. Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	1.1 Mendeskripsikan hakikat norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan, yang berlaku dalam masyarakat 1.2 Menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi warganegara 1.3 Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Mendeskripsikan makna Proklamasi Kemerdekaan dan konstitusi pertama	2.1 Menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan 2.2 Mendeskripsikan suasana kebatinan konstitusi pertama 2.3 Menganalisis hubungan antara proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945 2.4 Menunjukkan sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi pertama
Kelas VII, Semester 2	
3. menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM)	3.1 Menguraikan hakikat, hukum dan kelembagaan HAM 3.2 Mendeskripsikan kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM 3.3 Menghargai upaya perlindungan HAM 3.4 Menghargai upaya penegakan HAM
4. Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat	4.1 Menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat 4.2 Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab 4.3 Mengaktualisasikan kemerdekaan

	mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab
--	--

Sumber: Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, lampiran II, hlm. 203

6. Ruang Lingkup Mata Pelajaran PPKn

Perubahan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), maka ruang lingkup PPKn meliputi:

- a. Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa
- b. UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia
- d. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Permendikbud No.58 Tahun 2014 lampiran III, hlm.223)

Sesuai dengan Permendikbud tentang Standar isi dijelaskan bahwa tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi PPKn pada SMP/MTs/SMPLB/PAKET B sebagai berikut:

Tabel 2.3. Kompetensi dan Ruang Lingkup Materi PPKn

Tingkat Kompetensi	Tingkat Kelas	Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
4	VII-VIII	• Menjelaskan komitmen para pendiri Negara	• Komitmen para pendiri Negara dalam

		<p>dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis proses pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 • Menunjukkan sikap toleransi dalam makna keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika • Menjelaskan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI • Menunjukkan perilaku menghargai dengan dasar: moral, norma, prinsip dan spirit kewarganegaraan 	<p>merumuskan dan menetapkan Pancasila</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Norma hukum dan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara • Harmoni keutuhan wilayah dan kehidupan dalam konteks NKRI • Makna keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
4 A	IX	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan sikap dalam dinamika perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara individual dan kolektif • Menganalisis nilai dan moral yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 • Menjelaskan masalah yang muncul terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinamika perwujudan nilai dan moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari • Esensi nilai dan moral Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Makna ketentuan hukum yang berlaku dalam perwujudan kedamaian dan

		keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya • Menerapkan perilaku kewarganegaraan berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam rangka pengokohan NKRI • Menghargai dan menghayati dengan dasar: kesadaran nilai, moral, norma, prinsip dan spirit keseluruhan entitas kehidupan kebangsaan	keadilan • Semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat • Aspek-aspek pengokohan NKRI
--	--	---	---

Sumber: Permendikbud No.58 Tahun 2014 lampiran III, hlm.226-228

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar jenjang SMP/MTs/SMPLB/ Paket B sesuai dengan Permendikbud sebagaimana tercantum dalam lampiran 1. Kerangka Dasar dan Struktur Program, hlm. 34-35.

Tabel 2.3. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya	1.1 Menghargai perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan	2.1 Menghargai semangat dan komitmen kebangsaan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara 2.2 Menghargai perilaku sesuai norma-norma dalam berinteraksi dengan kelompok sebaya dan masyarakat sekitar 2.3 Menghargai sikap toleran

keberadaannya	<p>terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender</p> <p>2.4 Menghargai semangat persatuan dan kesatuan dalam memahami daerah tempat tinggalnya sebagai bagian yang utuh dan tak terpisahkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)</p>
<p>3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata</p>	<p>3.1 Memahami sejarah dan semangat komitmen para pendiri Negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara</p> <p>3.2 Memahami sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>3.3 Memahami isi alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>3.4 Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara</p> <p>3.5 Memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI</p> <p>3.6 Memahami keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender</p> <p>3.7 Memahami pengertian dan makna <i>Bhinneka Tunggal Ika</i></p>
<p>4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori</p>	<p>4.1 Menyaji hasil telaah tentang “sejarah dan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara”</p> <p>4.2 Menyaji hasil telaah tentang sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.3 Menyaji hasil kajian isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>4.4 Menyaji hasil pengamatan tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa</p>

	<p>4.5 Menyaji hasil pengamatan karakteristik daerah tempat tinggalnya sebagai bagian utuh dari NKRI</p> <p>4.6 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender</p> <p>4.7 Menyaji hasil telaah tentang makna <i>Bhinneka Tunggal Ika</i></p> <p>4.8 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional</p>
--	--

Sumber: Permendikbud No.58 Tahun 2014

B. Peran Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

1. Pengertian Peran

Menurut Soekanto & Sulistyowati (2014: 210) menyatakan bahwa “peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut telah melaksanakan perannya.” Berdasarkan pendapat di atas, menjelaskan bahwa seseorang telah melaksanakan perannya apabila hak dan kewajiban telah dilaksanakan dengan baik sesuai kedudukannya dalam masyarakat.

Menurut Ahmadi dalam (Ahadi, 2017: 521) “peran adalah suatu kompleks manusia terhadap cara individu harus berbuat apa dan bersikap dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.” Dari pendapat di atas dapat didefinisikan bahwa peran merupakan cara seseorang untuk mengendalikan sikap yang ada pada dirinya berdasarkan status sosialnya untuk mewujudkan kehidupan

yang lebih baik. Jhonson dalam (Ahadi, 2017: 521) juga menyatakan bahwa “peran merupakan kemampuan seseorang dalam mengorganisir perilaku dalam suatu sistem keseluruhan yang merupakan unsur yang sangat penting dimiliki seseorang untuk dapat hidup secara layak dalam kehidupan pribadi maupun kelompok/masyarakat.” Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa peran adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengatur kehidupan yang baik untuk diri sendiri maupun kelompok agar hidupnya bermanfaat.

2. Pengertian Peran Pembelajaran PPKn

Pembelajaran adalah kegiatan interaksi yang dilakukan oleh guru dengan peserta didik menggunakan komponen-komponen pembelajaran untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Proses pembelajaran dilakukan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga kemampuan peserta didik menjadi lebih baik. Menurut Ahadi (2017: 521) “pembelajaran bertujuan untuk menciptakan perubahan secara terus-menerus dalam perilaku dan pemikiran peserta didik pada suatu lingkungan belajar.” Pendapat tersebut menjelaskan, pembelajaran ialah proses interaksi antara guru, peserta didik, dan sumber belajar yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam belajar.

Menurut Prawiradilaga (2009: 19) “pembelajaran diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar konvensional dimana guru dan peserta didik langsung berinteraksi.” Dari pendapat tersebut dapat

dikatakan bahwa pembelajaran merupakan kegiatan mentransfer ilmu secara langsung dengan tatap muka dan adanya interaksi antara pengajar dan peserta didik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (20) menyatakan bahwa “pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar.” Namun dengan diberlakukannya kurikulum yang baru, pembelajaran tidak hanya kegiatan mentransfer ilmu melainkan menggali ide pada peserta didik agar aktif dalam pembelajaran.

Sejalan dengan hal itu Anurrahman (2010: 34) menyebutkan pembelajaran berupaya mengubah masukan berupa siswa yang belum terdidik, menjadi siswa yang terdidik, siswa yang belum memiliki pengetahuan tentang sesuatu, menjadi siswa yang memiliki pengetahuan. Demikian pula siswa yang memiliki sikap, kebiasaan atau tingkah laku yang belum mencerminkan eksistensi dirinya sebagai pribadi baik atau positif, menjadi siswa yang memiliki sikap, kebiasaan dan tingkah laku yang baik.

Berdasarkan pendapat di atas didapatkan keterangan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses interaksi yang dilakukan oleh guru, peserta didik, dan komponen pembelajaran dengan tujuan untuk memberikan contoh yang baik dengan cara mendidik peserta didik agar menjadi pribadi yang baik yaitu mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan yang telah dilakukan. Sebagai peserta didik

maka tugasnya adalah belajar agar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki berkembang menjadi lebih baik.

Peran pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik melalui interaksi dalam proses pembelajaran yang berperan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk sikap dan kepribadian yang bertanggung jawab.

3. Komponen Pembelajaran

Menurut Hamruni (2012: 11-13) pembelajaran merupakan suatu sistem instruksional yang mengacu pada seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan. Sebagai suatu sistem, pembelajaran meliputi:

a. Guru

Guru adalah pelaku pembelajaran, sehingga dalam hal ini guru merupakan faktor yang terpenting. Di tangan gurulah sebenarnya letak keberhasilan pembelajaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (1) bahwa “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.” Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa guru merupakan profesi yang menuntut guru harus profesional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk peserta didik.

b. Peserta didik

Peserta didik merupakan komponen yang melakukan kegiatan belajar untuk mengembangkan potensi kemampuan menjadi nyata guna mencapai tujuan belajar. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa peserta didik merupakan komponen pembelajaran yang utama selain guru karena proses interaksi pembelajaran dilakukan oleh guru dan peserta didik. Proses pembelajaran yang dilakukan tidak hanya memberikan materi pembelajaran tetapi peserta didik juga harus diberikan perhatian sebagaimana dikatakan oleh Melati (2016: 73) bahwa “guru PKn disisi lain tidak hanya bertanggung jawab terhadap keberhasilan belajar siswa, tetapi perhatian utama dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar.”

c. Tujuan Pembelajaran

Tujuan merupakan dasar yang dijadikan landasan untuk menentukan strategi, materi, media, dan evaluasi pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran, penentuan tujuan merupakan komponen yang pertama kali harus dipilih oleh seorang guru, karena tujuan pembelajaran merupakan target yang ingin dicapai

dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas didapatkan hal penting bahwa tujuan pembelajaran merupakan bentuk pencapaian dari kegiatan pembelajaran. Proses kegiatan belajar mengajar akan berjalan dengan lancar jika tujuan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik.

d. Bahan pelajaran

Bahan pelajaran merupakan medium untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berupa materi yang tersusun secara sistematis dan dinamis sesuai dengan arah tujuan dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan tuntutan masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa materi pembelajaran merupakan bahan untuk dipelajari oleh peserta didik agar tujuan pembelajaran tercapai. Dalam penelitian, materi yang dijelaskan yaitu kelas VII tentang perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kelas VIII tentang komitmen para pendiri Negara. Dari materi tersebut, peserta didik dapat memahami bagaimana para pahlawan memperjuangkan negaranya dengan penuh tanggung jawab.

e. Metode

Metode adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, *discovery learning* dengan

model kajian dokumen historis. Menurut Prawiladilaga (2009: 18) mengatakan bahwa “dalam disain pembelajaran langkah ini sangat penting karena metode inilah yang menentukan situasi belajar yang sesungguhnya.” Pendapat tersebut menjelaskan bahwa metode pembelajaran akan mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Oleh karena itu, metode pembelajaran harus disesuaikan dengan materi pembelajaran agar peserta didik dapat dengan mudah mempelajari materi yang diberikan oleh guru.

f. Media atau alat

Alat yang dipergunakan dalam pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media yang digunakan meliputi video pembacaan teks proklamasi, gambar naskah teks proklamasi, gambar pahlawan nasional. Alat yang digunakan meliputi kertas karton, LCD, laptop.

g. Sumber belajar

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat atau rujukan dimana bahan pembelajaran bisa diperoleh. Jadi sumber belajar dapat bervariasi sesuai dengan materi pembelajaran, semakin banyak sumber belajar yang digunakan maka materi pembelajaran menjadi luas. Sehingga peserta didik selalu mendapatkan

informasi baru mengenai materi pembelajaran melalui berbagai sudut pandang. Dalam penelitian, sumber belajar yang digunakan meliputi buku siswa dan buku guru cetakan ke-3 Maret 2016, UUD NRI 1945, sumber internet.

h. Evaluasi

Evaluasi merupakan komponen yang berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Pendapat di atas menjelaskan bahwa evaluasi atau penilaian akan dilakukan oleh guru sehingga dapat diketahui keberhasilan proses pembelajaran. Evaluasi atau penilaian yang dilakukan meliputi penilaian sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan.

C. Sikap Tanggung Jawab

1. Pengertian Sikap Tanggung Jawab

★ Menurut Rochmah (2016: 37) “sikap bertanggung jawab merupakan karakteristik manusia berbudaya sekaligus manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia yang sejak dini usia sudah dibiasakan untuk mengembangkan hati nurani, maka dia akan merasa bersalah ketika segala sesuatu yang dia lakukan dan sikapi merugikan pihak lain.” Berdasarkan pendapat di atas menyatakan bahwa sikap tanggung jawab harus dibekali kepada peserta didik sejak usia dini sehingga di dalam kehidupan sehari-hari menjadi terbiasa untuk bertanggung jawab terhadap segala perbuatan. Mengembangkan

sikap dan perilaku bertanggung jawab juga dapat dikembangkan melalui pembiasaan dalam pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Lickona (2013: 95) menyatakan “tanggung jawab adalah sisi aktif moralitas yang meliputi peduli terhadap diri sendiri dan orang lain, memenuhi kewajiban, memberi kontribusi terhadap masyarakat, meringankan penderitaan orang lain, dan menciptakan dunia yang lebih baik.” Pendapat tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab merupakan sikap seseorang yang tidak hanya peduli terhadap diri sendiri tetapi juga meringankan beban orang lain. Menurut Rich dalam (Faradiba & Royanto, 2018: 94-95) “tanggung jawab juga dapat dibentuk dengan membantu individu agar merasa memiliki kompetensi, mengetahui, dan melakukan hal yang harus dilakukan.” Untuk itu, peserta didik harus diberikan tugas agar dapat meningkatkan kemampuan yang telah dimilikinya. Dengan diberikan tugas, peserta didik akan belajar bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban sebagai pelajar.

Fitzpatrick dalam (Rochmah, 2016: 42-43) memberikan beberapa pedoman untuk mengajak peserta didik berbagi dan mengemban tanggung jawab di kelas, diantaranya adalah:

- a. Libatkan peserta didik dalam perencanaan dan implementasi inisiatif sekolah dan kelas. Partisipasi ini membantu memuaskan

kebutuhan peserta didik untuk merasa percaya diri dan merasa memiliki.

- b. Dorong peserta didik untuk menilai tindakan mereka sendiri. Daripada penghakiman atas perilaku peserta didik, lebih baik mengajukan pertanyaan yang memotivasi peserta didik untuk mengevaluasi perilaku mereka sendiri. Misalnya, “*apakah perbuatan kalian sesuai dengan aturan di kelas?*” Pertanyaan semacam ini dapat membantu peserta didik untuk dapat bertanggung jawab, mungkin pada awalnya peserta didik akan mencari siapa yang akan dikambing hitamkan atau mengalihkan persoalan dengan mengajukan berbagai alasan misalnya. Dalam situasi semacam itu, guru harus fokus dan membimbing peserta didik agar dapat bertanggung jawab.
- c. Jangan menerima dalih. Alasan biasanya dimaksudkan untuk menghindari tanggung jawab. Jangan mendiskusikan alasan. Lebih baik tanya pada peserta didik tentang apa yang akan mereka lakukan nanti jika situasi yang sama terjadi.
- d. Beri waktu agar peserta didik dapat menerima tanggung jawab. Peserta didik tidak akan berubah menjadi anak bertanggung jawab dalam waktu semalam saja. Artinya jika kita para pendidik menginginkan perubahan dari tidak atau belum bertanggung jawab menuju bertanggung jawab adalah butuh

proses yang disana ada pembelajaran, bagi guru maupun peserta didik. Karena sesuatu yang baik ialah yang bertahap.

- e. Biarkan peserta didik berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dengan mengadakan rapat kelas. William Glasser dalam buku *School Without Failure*, menyatakan bahwa rapat kelas dapat berguna untuk menghadapi problem perilaku peserta didik atau isu yang berkaitan dengan guru dan peserta didik.

Sikap tanggung jawab sangat penting ditanamkan kepada peserta didik. Dengan tanggung jawab, kewajiban-kewajiban peserta didik di sekolah dapat dilaksanakan dengan baik. Sebaliknya, jika peserta didik tidak bertanggung jawab maka tugas-tugas tidak dapat dilaksanakan. Fitri (2017: 43) mengemukakan indikator tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik
- b. Bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan
- c. Melakukan piket sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- d. Mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama

Berdasarkan pendapat di atas, menjelaskan bahwa terdapat empat indikator yang dapat dilaksanakan oleh peserta didik untuk menanamkan sikap tanggung jawab. Dengan begitu, peserta didik dapat memiliki sikap yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap tanggung jawab penting untuk dimiliki setiap peserta didik karena akan mempengaruhi dalam melaksanakan tugas

dan kewajiban di sekolah. Peserta didik yang bertanggung jawab akan dengan mudah untuk melaksanakan tugasnya di sekolah tetapi, peserta didik yang tidak bertanggung jawab akan merasa kesulitan untuk melaksanakan tugasnya di sekolah. Oleh karena, pembelajaran PPKn dapat melatih tanggung jawab peserta didik dengan menanamkan keempat indikator di atas dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Sehingga ketika peserta didik berada di lingkungan masyarakat luas akan terbiasa dengan sikap bertanggung jawab tersebut.

Sikap tanggung jawab peserta didik tidak hanya untuk melaksanakan kewajiban tetapi juga mempunyai hak sebagai peserta didik. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12 bahwa:

- 1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c) mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d) mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

- e) pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

2) Setiap peserta didik berkewajiban:

- a) menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b) ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Macam-macam Tanggung Jawab

Menurut Soekanto dalam (Mustari, 2017: 20) menyatakan bahwa di antara tanggung jawab yang mesti ada pada manusia adalah:

- a. Tanggung jawab kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan dengan cara takut kepada-Nya, bersyukur, dan memohon petunjuk. Semua manusia bertanggung jawab kepada Tuhan Pencipta Alam Semesta. Tak ada seorang pun manusia yang lepas bebas dari tanggung jawab, kecuali orang itu gila atau anak-anak.
- b. Tanggung jawab untuk membela diri dari ancaman, siksaan, penindasan dan perlakuan kejam dari mana pun datangnya.

- c. Tanggung jawab diri dari kerakusan ekonomi yang berlebihan dalam mencari nafkah, ataupun sebaliknya, dari bersifat kekurangan ekonomi.
- d. Tanggung jawab terhadap anak, suami/istri, dan keluarga.
- e. Tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar.
- f. Tanggung jawab berpikir, tidak perlu mesti meniru orang lain dan menyetujui pendapat umum atau patuh secara membuta terhadap nilai-nilai tradisi, menyaring segala informasi untuk dipilih, mana yang berguna dan mana yang merugikan kita. Dalam kebebasan berpikir perlu ada pemupukan kreasi, yang berarti mampu mencari pemecahan dari masalah-masalah hidup yang kian rumit kita hadapi, dan menciptakan alternatif baru yang berguna bagi masyarakat.
- g. Tanggung jawab dalam memelihara hidup dan kehidupan, termasuk kelestarian lingkungan hidup dari berbagai bentuk pencemaran.

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab mempunyai makna yang luas karena pertanggung jawaban tidak hanya terhadap diri sendiri, melainkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, maupun keluarga. Oleh karena itu, peserta didik sebagai pelajar harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan peserta didik terutama dalam hal sikap tanggung jawab.

3. Kesadaran Sikap Tanggung Jawab Peserta Didik di SMP

Sikap tanggung jawab yang dimiliki peserta didik masih kurang. Di SMP Negeri 5 Purwokerto, beberapa peserta didik mengandalkan orang lain ketika diberikan tugas oleh guru mereka ataupun ketika ulangan harian. Tanpa belajar terlebih dahulu, peserta didik tidak dapat mengerjakan ulangan harian. Pada penelitian yang telah dilakukan, kemampuan peserta didik dalam menjalankan tugas dan kewajiban pada dasarnya sudah melekat dalam diri peserta didik seperti ketika peserta didik mengerjakan PR dan mengumpulkannya tepat waktu, memakai seragam sesuai aturan sekolah, melaksanakan tugas piket sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Namun, bagi peserta didik yang tidak disiplin akan kesulitan untuk melaksanakan tugas-tugas sekolah karena rendahnya kesadaran pada peserta didik yang menjadikan kurang bertanggung jawab.

★ Peran pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan telah berupaya untuk mengatasi peserta didik yang kurang dalam bertanggung jawab, dengan cara menerapkan keempat indikator. *Pertama*, mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik yaitu dalam setiap pembelajaran, guru memberikan tugas dan pekerjaan rumah untuk melatih peserta didik apakah selalu mengerjakan tugas atau menunda untuk mengerjakan tugas. *Kedua*, bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan yaitu sekolah mempunyai aturan yang harus dipatuhi oleh peserta didik karena jika ada yang melakukan

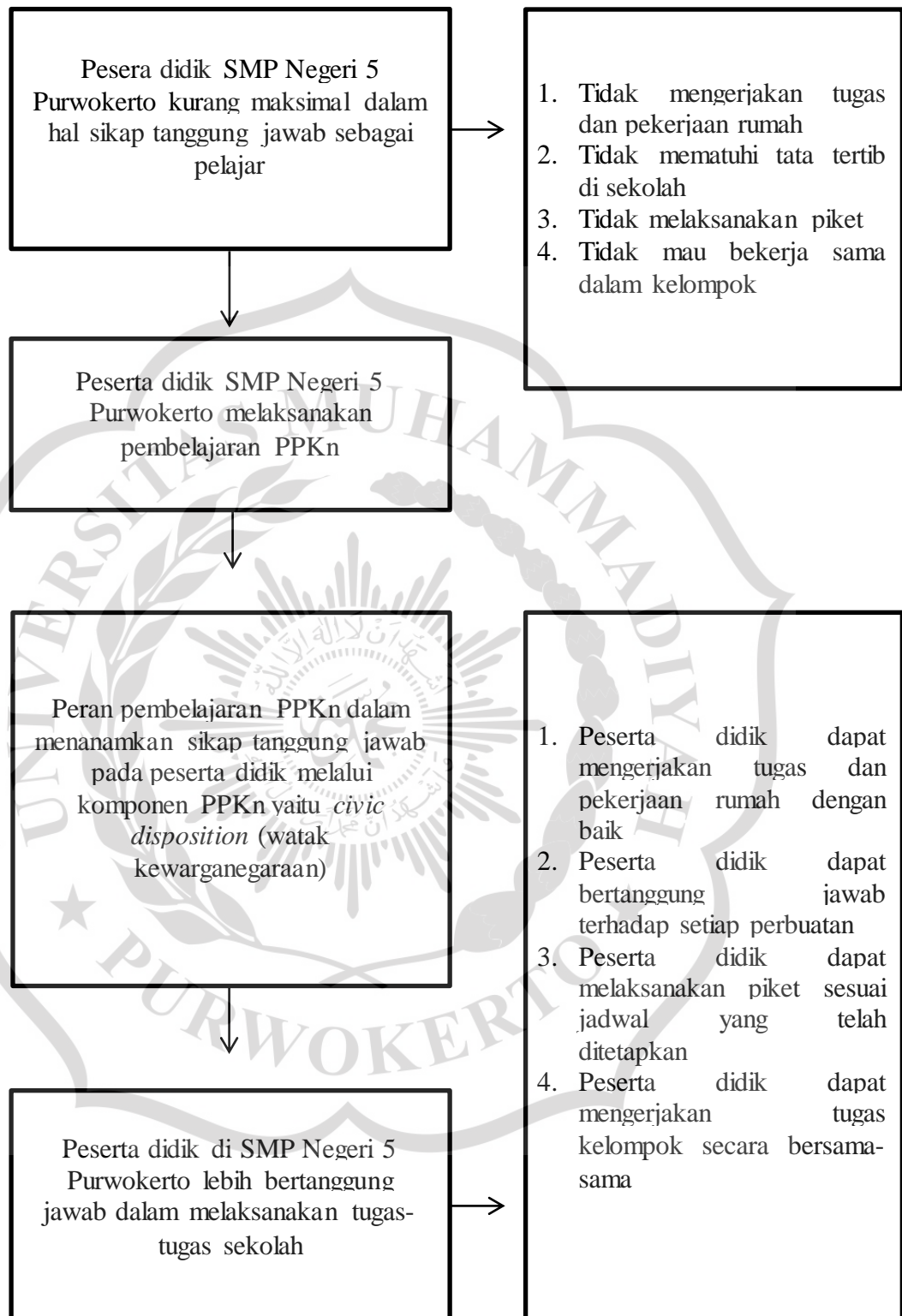
pelanggaran maka akan mendapatkan sanksi. *Ketiga*, melaksanakan piket sesuai jadwal yang telah ditetapkan yaitu kelas harus selalu bersih sebelum pembelajaran dimulai hingga selesai pembelajaran, dengan membentuk jadwal piket akan memudahkan peserta didik untuk membersihkan lingkungan kelas. *Keempat*, mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama yaitu dalam pembelajaran guru membentuk kelompok untuk berdiskusi tentang materi yang telah ditentukan, dengan tujuan agar peserta didik dapat bekerja sama dengan teman yang lainnya dan menyatukan beberapa pendapat dari masing-masing peserta didik. Menurut Azzet (2014: 43) mengatakan bahwa:

Karakter penting yang harus dibangun agar anak didik dapat meraih keberhasilan, baik di sekolah maupun setelah lulus, adalah kemampuan dalam menjalin kerja sama dengan teman-temannya atau orang lain. Kemampuan dalam menjalin kerja sama ini dapat dilatihkan kepada anak didik dengan sering membuat kerja kelompok pada saat proses mengajar.

Pendapat di atas menjelaskan kerja sama penting di dalam sebuah kelompok, karena dengan bekerja sama maka tugas akan menjadi ringan. Dari keempat indikator tersebut, peserta didik dapat mengembangkan sikap tanggung jawab melalui pembelajaran PPKn.

D. Kerangka Berpikir

Berikut ini merupakan kerangka berpikir pada penelitian Peran Pembelajaran PPKn dalam Menanamkan Sikap Tanggung Jawab pada Peserta Didik di SMP Negeri 5 Purwokerto.



Gambar 2.5. Kerangka Berpikir

E. Hasil Penelitian Sebelumnya yang Relevan

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Palunga dan Marzuki (2017) Peran Guru dalam Pengembangan Karakter Peserta Didik di SMP Negeri 2 Depok Sleman

Peran guru sebagai teladan dalam pengembangan karakter peserta didik di SMPN 2 Depok Sleman adalah sebagai teladan berkarakter, dan peran itu ditunjukkan oleh tutur kata, sikap, dan kepribadiannya yang mencerminkan nilai-nilai karakter yang baik. Misalnya, sopan santun, disiplin, tanggung jawab, toleransi, jujur, dan kepedulian terhadap peserta didik dan orang lain. Peran guru terus diupayakan melalui keteladanan berkarakter dan berbagai kegiatan yang terkait dengan pendidikan karakter seperti program sambut siswa, tadarus Alquran, salat duha, perayaan hari-hari besar agama, manasik haji, kegiatan ekstrakurikuler pramuka, tonti, dan olahraga.

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2016) Implementasi Pembelajaran Nilai Tanggung Jawab Pada Siswa Kelas III SD 1 Pedes Sedayu Bantul Tahun Pelajaran 2014/2015

Implementasi pembelajaran nilai tanggung jawab di SD 1 Pedes yaitu 1) Dapat diandalkan ketika sepakat mengerjakan sesuatu; 2) Fokus pada pekerjaan yang sedang dikerjakan; 3) Meminta maaf apabila membuat kesalahan; 4) Berpikir sebelum bertindak.

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2016) Pembentukan Sikap Tanggung Jawab Di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bayan Kabupaten Purworejo

Cara yang digunakan oleh guru dan kepala sekolah untuk membentuk sikap tanggung jawab siswa baik di dalam maupun di luar proses pembelajaran adalah sebagai berikut: (1) melalui pemberian pengalaman berulang, (2) melalui pemberian keteladanan, (3) melalui pemberian sugesti, (4) melalui kegiatan identifikasi sikap tanggung jawab, dan (5) melalui pemberian hukuman. Dalam pelaksanaannya, pembentukan sikap tanggung jawab di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah Bayan Kabupaten Purworejo masih terkendala oleh beberapa hal yaitu: (1) kurangnya pengalaman siswa terhadap sikap tanggung jawab, (2) budaya yang dibawa oleh siswa dari rumah, (3) pengaruh media massa, dan (4) keadaan emosi siswa.

4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Elviana (2017) Pembentukan Sikap Mandiri Dan Tanggung Jawab Melalui Penerapan Metode Sosiodrama Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Sikap mandiri dan tanggung jawab dapat dikembangkan pada diri peserta didik melalui metode pembelajaran yang mampu mendorong perkembangan karakter tersebut. Dengan kata lain metode pembelajaran harus mampu mendorong peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar secara mandiri dan bertanggung jawab menyelesaikan tugas dengan baik. Metode sosiodrama dapat

membantu peserta didik dalam memahami materi yang diberikan oleh guru serta dapat mengembangkan sikap mandiri dan tanggung jawab pada diri peserta didik. Hal ini disebabkan karena dalam metode sosiodrama dibutuhkan kemampuan pribadi dalam memahami materi yang berusaha disampaikan dalam drama, memerlukan kemampuan pribadi untuk memerankan karakter sesuai dengan naskah, tanggung jawab dalam kerjakelompok untuk menampilkan drama dengan baik, serta kerja kelompok untuk memberikan pemecahan atas masalah yang terkandung dalam cerita drama tersebut.

5. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuriyatun (2016) Implementasi Pendidikan Karakter Disiplin Dan Tanggung Jawab Di Sd Negeri 1 Bantul

Pelaksanaan implementasi pendidikan karakter disiplin dan tanggung jawab di SD Negeri 1 Bantul dilakukan dengan pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam program pengembangan diri meliputi kegiatan rutin, kegiatan spontan, keteladanan, dan pengkondisian. Pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam budaya sekolah meliputi kegiatan kelas, sekolah dan luar sekolah. Evaluasi implementasi pendidikan karakter disiplin dan tanggung jawab di SD Negeri 1 Bantul dilakukan dengan melakukan penilaian sikap pada siswa untuk kemudian dibahas permasalahan bersama saat rapat bersama guru dan kepala sekolah serta melibatkan wali siswa apabila diperlukan.